



## Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Industri UMKM UD. Salacca

Jelita Handayani Rambe<sup>1</sup>, Meilinda Ritonga<sup>2</sup>, Dini Lestari<sup>3</sup>

jelitahandayani07@gmail.com<sup>1</sup>, melindaritongah@gmail.com<sup>2</sup>

dinilestarihasibuan@gmail.com<sup>3</sup>

---

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

keyword 1; Peranan  
keyword 2;  
Pemerintah Tapanuli  
Selatan  
Keyword 3; UD  
Salacca

---

#### Article history:

Received 2022-10-11

Revised 2022-10-18

Accepted 2022-12-08

---

### ABSTRACT

One of the UMKM in South Tapanuli is UD. Salacca is a small and medium-sized industry that processes salak fruit into various food and beverage products. The existence of this business provides added value to salak commodities and can be a source of income for business actors. In order to develop the MSME sector, local governments are required to provide facilities, guidance, empowerment and assistance to develop and improve the competitiveness of MSMEs. The purpose of this study is to find out how big the role of the South Tapanuli Regency Government is in supporting Regional MSMEs, especially UD Salacca. The research method used is descriptive qualitative which aims to describe the function of local government participation in the empowerment of UD Salacca MSMEs in Padang Sidempuan City with literature studies or literature reviews and interviews as a source of data for this research. The results obtained from this research are that there are 3 roles carried out by the Regional Government of South Tapanuli Regency in supporting UD Salacca MSMEs, namely: facilitative role, educational role and technical role. The role of the Local Government that has a significant impact on the sale of UD Salacca is by promoting and providing facilities in the form of vacuum frying. In addition, the local government also provides business skills training to help increase the productivity of business results.

---

### ABSTRAK

Salah satu UMKM di Tapanuli Selatan adalah UD. Salacca merupakan industri kecil menengah yang mengolah buah salak menjadi berbagai produk makanan dan minuman. Keberadaan usaha ini memberikan nilai tambah pada komoditi salak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi para pelaku usaha. Dalam rangka mengembangkan bidang UMKM, pemerintah daerah wajib memberikan fasilitas, pembinaan, pemberdayaan dan bantuan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kemampuan daya saing UMKM. Tujuan dilakukannya penelitian

---

ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mendukung UMKM Daerah khususnya UD Salacca. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi keikutsertaan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM UD Salacca di Kota Padang Sidempuan dengan studi literatur atau tinjauan pustaka dan wawancara sebagai sumber data penelitian ini. Hasil yang didapat dari dilakukannya penelitian ini ialah bahwa terdapat 3 peran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mendukung UMKM UD Salacca yaitu: peran fasilitatif, peran edukasional dan peran teknis. Peran Pemerintah Daerah yang cukup berdampak pada penjualan UD Salacca adalah dengan promosi dan pemberian fasilitas berupa vacuum frying. Selain itu Pemerintah Daerah juga memberikan pelatihan keterampilan usaha untuk membantu meningkatkan produktivitas hasil usaha

---

## PENDAHULUAN

Untuk dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, maka peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tumpuan perekonomian negara merupakan salah satu contoh potensi yang ada di daerah pemda. Pemerintah daerah sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini dan mendorong bisnis tersebut (Siti Nurhalita & Imsar, 2022). UMKM sangat penting untuk menurunkan pengangguran, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan rasa identitas bangsa. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan bidang UMKM, pemerintah daerah wajib memberikan fasilitas, pembinaan, pemberdayaan dan mendukung pertumbuhan UMKM dan peningkatan daya saing. Kepedulian pemerintah juga ditunjukkan dengan banyaknya fasilitas yang ditawarkan kepada pemilik usaha kecil, termasuk tunjangan pajak, prosedur perizinan yang dipermudah, serta saran dan arahan bagi pengusaha (Siregar & Jaffisa, 2020).

Salah satu UMKM yang ada di Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki berbagai potensi industri yang umumnya merupakan industri skala kecil dan menengah. Kabupaten Tapanuli Selatan yang dikenal sebagai daerah penghasil salak memiliki potensi yang cukup banyak, mulai dari produk makanan dan minuman olahan yang sangat perlu dikembangkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Salah satu UKM di Tapanuli Selatan adalah UD. Salaka merupakan industri kecil menengah yang mengolah buah salak menjadi berbagai produk makanan dan minuman. Keberadaan usaha ini memberikan nilai tambah pada komoditi salak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi para pelaku usaha. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan didukung oleh

sektor ekonomi unggulan yang dapat dijadikan potensi daerah untuk pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung UMKM adalah memberikan subsidi bahan baku, berperan sebagai fasilitator untuk memudahkan akses pengajuan kredit mikro, dan membantu pemangku kepentingan UMKM untuk mengusahakan dan menjaga iklim usaha yang kondusif. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung UD.Salacca agar dapat berkembang dan mampu menciptakan produk yang inovatif serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah (Sumadi & Prathama, 2021).

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mendukung UMKM Daerah khususnya UD Salacca. Dari penguraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Industri UMKM (Studi Kasus Kue Bolu UD Salacca)”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan berusaha mendeskripsikan peran keterlibatan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM UD Salacca di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menggunakan wawancara dan studi literatur atau tinjauan pustaka sebagai sumber data penelitian ini.

Tinjauan pustaka digunakan dengan mencari artikel-artikel tentang pengembangan UMKM yang muncul dalam publikasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Studi literature yang dilakukan untuk penelitian ini mencari tulisan sebelumnya tentang subjek yang ada, yang digabungkan dengan ide penulis untuk memberikan jenis pemahaman konseptual yang dapat menginformasikan baik masyarakat umum maupun penulis pada khususnya (Budiyanto & Effendy, 2020).

Untuk menambah pengetahuan penulis yang akan sangat membantu dalam penelitian ini maka dilakukan wawancara kepada informan UMKM dari UD Salacca untuk penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Pemerintah Daerah**

Menurut Soekanto, Istilah “peran” lebih berkaitan dengan proses, penyesuaian, dan fungsi. Oleh karena itu, seseorang yang menduduki jabatan dalam pemerintahan akan memangku jabatan tersebut.

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, tujuan pengembangan masyarakat adalah untuk memperkuat kapasitas pelaku masyarakat untuk merencanakan dan memutuskan sendiri tindakan yang akan meningkatkan kualitas hidup

mereka. Ada empat kategori yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional, dan peran teknis yang digunakan untuk mengkategorikan pengembangan masyarakat (Purba & Departemen, 2018).

Menurut Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Kemampuan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dimiliki oleh pemerintah daerah yang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional.

Tiga komponen utama yang membentuk kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga: pertama, pelimpahan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah; kedua, pemberian kepercayaan dan kewenangan untuk memikirkan, mengambil inisiatif, dan memutuskan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas; dan ketiga, upaya memikirkan, berinisiatif, dan mengambil keputusan dengan melibatkan masyarakat, baik secara langsung maupun DPRD (Christofer, 2019).

### **Industri, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Istilah "industri" sering digunakan untuk merujuk pada semua aktivitas ekonomi manusia yang mengubah bahan mentah atau barang menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Industri dapat diartikan secara luas sebagai segala usaha manusia dalam bidang ekonomi yang bersifat produktif dan komersial untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia (Tyas et al., 2020). Dalam arti luas, ada dua kategori industri: **Industri primer**, yang mencakup kegiatan seperti pertanian, pertambangan, dan kehutanan yang secara langsung mengambil barang ekonomi dari alam tanpa pengolahan lebih lanjut, dan **Industri sekunder**, yang mencakup kegiatan seperti mengolah bahan mentah menjadi semi- barang jadi atau barang jadi. Industri sekunder disebut juga sebagai industry manufaktur atau pabrik (Sumadi & Prathama, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan secara berbeda di setiap literatur oleh berbagai instansi, lembaga, bahkan undang-undang. UMKM didefinisikan sebagai berikut sesuai dengan UU UMKM No. 20 Tahun 2008:

1. Menurut undang-undang ini, usaha mikro adalah usaha menguntungkan milik orang atau badan hukum perseorangan yang memenuhi persyaratan Usaha Mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha yang berhasil secara ekonomi yang beroperasi secara mandiri, dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang, dan yang memenuhi persyaratan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Usaha kecil juga harus memenuhi persyaratan kepemilikan, kontrol, atau afiliasi usaha menengah dan besar.
3. Usaha menengah adalah usaha menguntungkan yang beroperasi secara

mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar, tetapi dimiliki, dikuasai, atau terintegrasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi persyaratan Undang-Undang ini untuk total aset, kekayaan bersih, atau hasil penjualan tahunan.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah atau bangunan yang digunakan sebagai lokasi perusahaan.
2. Menargetkan penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 300.000.000.

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 dan tidak lebih dari Rp 500.000.000, tidak termasuk real estat dan bangunan yang digunakan untuk keperluan usaha.
2. Menghasilkan pendapatan tahunan minimal Rp 300.000.000 tetapi tidak lebih dari Rp 2.500.000.000.

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 dan tidak melebihi Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk keperluan usaha.
2. Menghasilkan pendapatan tahunan lebih besar dari Rp 2.500.000.000 dan tidak melebihi Rp 50.000.000.000 (Salam & Prathama, 2022).

## **UMKM UD SALACCA**

UD Salacca adalah usaha kecil menengah yang bergerak di bidang pengelolaan buah salak yang terletak di Lobu Layan Sigordang, Kec. Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bisnis ini dimiliki oleh bapak Ilham S.E dan sudah dijalankan mulai dari tahun 2014. Bisnis ini merupakan bisnis yang mengelolah buah salak yang merupakan buah khas Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi berbagai produk makanan dan minuman dan diharapkan mampu menjadi oleh-oleh yang pertama terlintas jika berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan memperhatikan tujuan dari dibukanya bisnis ini, maka yang menjadi sasaran pemasaran bisnis ini ialah orang-orang yang akan melakukan mudik atau orang-orang yang datang dari luar kota sehingga menjadikan UD Salacca sebagai oleh-oleh saat ia kembali ke kotanya.

Pada bagian ini, akan dibahas hasil data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan informan, pembahasan penelitian ini mengenai peran

pemerintah dalam mendukung UMKM UD Salacca yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan yang dikaji melalui teori menurut Jim Iff dan Frank Tesoriero yaitu: peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan dan peran teknis (Christofer, 2019). Dimana dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan informan didapatkan hasil bahwasannya hanya terdapat 3 peran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mendukung UMKM UD Salacca yaitu: peran fasilitatif, peran edukasional dan peran teknis.

### **Peran Fasilitatif**

Peran fasilitatif yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menunjang UMKM UD Salacca adalah dengan melakukan promosi dan memberikan fasilitas berupa mesin vacuum frying yang diberikan sekitar tahun 2010 kepada UD Salacca. Hasil wawancara peneliti di lapangan memperlihatkan bahwa promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pameran ternyata berdampak secara langsung pada pemasukan UD Salacca. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenaikan penjualan yang dialami UD Salacca dari tahun ke tahun sebelum adanya corona yang menghambat banyak aktivitas dan membuat UD Salacca mengalami penurunan drastis sebanyak 60% dari sebelumnya.

### **Peran Edukasional**

Peran edukasional yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menambah pengetahuan bagi pelaku usaha adalah memberikan pelatihan keterampilan usaha untuk membantu meningkatkan produktivitas hasil usaha (Mukoffi, 2018). Dari hasil wawancara peneliti di lapangan terdapat peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan hasil usaha dengan memberikan sosialisasi tentang bagaimana caranya melakukan pemasaran yang menarik serta membuat grup yang terdiri atas UMKM yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Melalui sosialisasi, Pemerintah Daerah juga mengajarkan banyak pengetahuan dini tentang dunia usaha seperti: akuntansi biaya, pembukuan, sosialisasi kewirausahaan pemula yang dapat membantu para pelaku usaha menjalankan usahanya dengan optimal.

### **Peran Teknis**

Berkaitan dengan keterampilan teknis, Pemerintah Daerah selalu melakukan pelatihan keterampilan bagi para pelaku usaha dalam menggunakan komputer (Jahidin, 2021). Dalam melakukan pemberdayaan Pemerintah Daerah selalu membuat seminar pelatihan dan pengembangan pelaku usaha dalam rangka memajukan dan memberikan informasi kepada pelaku usaha. Terkait peranan teknis yang dilakukan pemerintah daerah terdapat kendala yaitu masalah perizinan. Ketetapan perizinan yang hanya berlaku singkat menyusahkan terhadap UMKM contohnya masalah perizinan Dinas Kesehatan

terhadap kemasan/box yang digunakan oleh UD. Salacca. Dalam hal kemasan, banyak kemasan yang sebelumnya telah dipesan namun belum semua terpakai tetapi masa berlaku izinnnya sudah habis sehingga diperlukan perizinan ulang ke pihak dinkes agar kemasan mendapatkan izin kembali.

## KESIMPULAN

Pemerintah berperan cukup besar dalam industri UMKM UD Salacca ini, dikarenakan UD Salacca adalah oleh-oleh khas daerah yang diolah menggunakan buah khas daerah pula. Pemerintah daerah nampaknya memiliki tanggung jawab cukup besar juga untuk ikut mempromosikan UD Salacca agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Peran Pemerintah Daerah yang cukup berdampak pada penjualan UD Salacca adalah dengan promosi dan pemberian fasilitas berupa vacuum frying.

## REFERENSI

- Budiyanto, A., & Effendy, A. A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam Memberdayakan Peranan UMKM dan Koperasi terhadap Perekonomian Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Mandiri*, 4(1), 80–93. <https://doi.org/10.33753/mandiri.v4i1.77>
- Christofer, O. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/25488>
- Jahidin, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Pisang Molen Coklat Di Desa Meunasah Capa Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, 5(5), 1–6.
- Mukoffi, A. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Malang (UMKM). *Jamswap; Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 3(0341), 64. <https://jurnal.stiegwalisongo.ac.id/index.php/JAMSWAP/article/view/94>
- Purba, G. M., & Departemen. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Umkm Di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang). *Purba Journal of Politic and Government Studies*, 1–17.
- Salam, M. D., & Prathama, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 137–143.
- Siregar, B. S., & Jaffisa, T. (2020). Peranan pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di desa laut dendang. *Jurnal Publik*

*Reform*, 7(1), 8–14.

- Siti Nurhalita, & Imsar. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Langkat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 84–90. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2282>
- Sumadi, M. F., & Prathama, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) “Handycraft” Limbah Kayu Jati Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5), 2322. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2701>
- Tyas, W. P., Sianturi, O. O., & H, J. K. P. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berbasis Rumah (Home-Based Enterprises/Hbe) Di Kota Semarang, Surakarta, Boyolali, Salatiga, Dan Surabaya. *Jurnal Pengembangan Kota*, 8(1), 78–89. <https://doi.org/10.14710/jpk.8.1.78-89>